

Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Pangan di Provinsi Papua: Analisis Realisasi Anggaran, Keluarga Penerima Manfaat, dan Distribusi Program

Henderina Morin^{1*}, Alvian M. Sroyer²

¹Program Studi Manajemen Administrasi Perkantoran, Universitas Cenderawasih, Indonesia

²Program Studi Matematika, Universitas Cenderawasih, Indonesia

Email: henderinamorin75@gmail.com



©2026 J-HEST FDI DPD Sulawesi Barat. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

ABSTRACT

The Food Social Assistance Program (BSP) is one of the Indonesian government's key policy instruments for reducing poverty and strengthening household food security. However, its implementation in Papua Province faces considerable challenges due to geographical constraints, limited infrastructure, and the region's socio-cultural characteristics. This study aimed to evaluate the effectiveness of the Food Social Assistance policy by examining the relationship between budget realization, the number of beneficiary households (Keluarga Penerima Manfaat—KPM), and the effectiveness of program distribution during the 2021–2024 period. A mixed-methods approach was employed using secondary data obtained from the Indonesian Ministry of Social Affairs and Statistics Indonesia (BPS). The data were analyzed using descriptive statistics, multiple linear regression, logistic regression, and qualitative policy analysis. The findings indicate that budget realization had a positive and statistically significant effect on the number of beneficiary households, with a regression coefficient of 3,100,000 ($p = 0.017$). Logistic regression analysis further revealed that both budget realization and the number of beneficiaries significantly increased the probability of effective program distribution ($p < 0.05$), particularly during 2023–2024 following improvements in beneficiary data validation and distribution coordination. Nevertheless, higher budget allocations did not automatically translate into more effective distribution, especially in geographically remote areas. This study concludes that the effectiveness of the Food Social Assistance policy depends not only on budget allocation but also on accurate targeting, reliable beneficiary data, efficient distribution mechanisms, and policy adaptation to Papua's local context.

Keywords: Food Social Assistance, policy effectiveness, beneficiary households, Papua, mixed methods.

ABSTRAK

Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Namun, implementasinya di Provinsi Papua menghadapi berbagai tantangan akibat kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dan karakteristik sosial-budaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan Bantuan Sosial Pangan di Provinsi Papua melalui hubungan antara realisasi anggaran, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan efektivitas distribusi bantuan selama periode 2021–2024. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan memanfaatkan data sekunder dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik, yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif, regresi linear, regresi logistik, serta analisis kualitatif terhadap konteks implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah KPM dengan koefisien regresi sebesar 3.100.000 ($p = 0,017$). Analisis regresi logistik juga menunjukkan bahwa jumlah KPM dan realisasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap probabilitas efektivitas distribusi bantuan ($p < 0,05$), dengan peningkatan efektivitas yang lebih konsisten pada periode 2023–2024 setelah dilakukan perbaikan validasi data penerima dan koordinasi distribusi. Meskipun demikian, peningkatan anggaran tidak selalu diikuti oleh peningkatan efektivitas distribusi, terutama pada wilayah dengan akses geografis yang sulit. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan BSP tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, kualitas data penerima, kapasitas distribusi, dan kemampuan kebijakan beradaptasi dengan kondisi lokal di Papua.

Kata kunci: Bantuan Sosial Pangan, Efektivitas Kebijakan, Keluarga Penerima Manfaat, Papua, Mixed Methods.

PENDAHULUAN

Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial yang dirancang pemerintah Indonesia untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya penghapusan kemiskinan dan kelaparan (Syahwanes et al., 2025; Sunty et al., 2025; Nurwahyuliningsih & Arsyad, 2025). Program ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme transfer bantuan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan dasar. Keberhasilan implementasi BSP sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima, kecukupan anggaran, efektivitas distribusi, serta kemampuan pemerintah menyesuaikan pelaksanaan program dengan karakteristik wilayah penerima.

Provinsi Papua merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan bantuan sosial di Indonesia (Prionggo et al., 2020). Selain memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lain, Papua juga memiliki karakteristik geografis yang kompleks, berupa wilayah pegunungan, kepulauan, serta daerah terpencil yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut menyebabkan biaya distribusi bantuan menjadi lebih tinggi, memperpanjang waktu penyaluran, dan meningkatkan risiko ketidaktepatan sasaran penerima. Di sisi lain, struktur sosial masyarakat Papua yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai komunal dan kelembagaan adat juga memengaruhi mekanisme pemanfaatan bantuan sosial di tingkat masyarakat (Jeddawi et al., 2025). Dengan demikian, efektivitas kebijakan bantuan sosial di Papua tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh faktor kelembagaan, sosial-budaya, dan kapasitas implementasi di tingkat lokal.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan sosial masih menghadapi sejumlah kendala mendasar. Tri et al. (2024) mengidentifikasi bahwa ketidakakuratan data penerima, keterlambatan distribusi, serta lemahnya sistem monitoring merupakan hambatan utama implementasi bantuan sosial di Indonesia.

Noerkaisar (2021) juga menemukan adanya *inclusion error* dan *exclusion error* yang menyebabkan sebagian rumah tangga miskin belum menerima bantuan, sementara sebagian penerima tidak lagi memenuhi kriteria. Selain itu, Rakhmat dan Firdaus (2019) menjelaskan bahwa diskresi birokrasi di tingkat pelaksana sering kali memengaruhi ketepatan distribusi bantuan sehingga menimbulkan ketimpangan dalam implementasi kebijakan. Di Papua, tantangan tersebut semakin kompleks akibat keterbatasan infrastruktur transportasi, tingginya biaya logistik, serta kondisi geografis yang menyulitkan distribusi bantuan secara merata.

Kajian lain menegaskan bahwa peningkatan anggaran bantuan sosial tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan efektivitas kebijakan. Wibowo et al. (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan program perlindungan sosial lebih dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, serta koordinasi antarinstansi dibandingkan semata-mata oleh besarnya alokasi anggaran. Demikian pula, Kambubuy et al. (2019) menekankan bahwa kemiskinan di Papua dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang adaptif dan berbasis karakteristik lokal. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan bantuan sosial perlu mempertimbangkan hubungan antara alokasi anggaran, jumlah penerima manfaat, kualitas distribusi, dan kondisi sosial masyarakat secara simultan.

Meskipun penelitian mengenai bantuan sosial di Indonesia telah berkembang cukup pesat, sebagian besar penelitian masih menggunakan pendekatan deskriptif atau hanya mengevaluasi implementasi program berdasarkan satu aspek, seperti ketepatan sasaran atau efektivitas distribusi. Penelitian terdahulu juga umumnya dilakukan pada tingkat nasional atau wilayah perkotaan sehingga belum banyak memberikan gambaran empiris mengenai implementasi bantuan sosial di wilayah dengan karakteristik geografis yang kompleks seperti Papua. Selain itu, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan analisis statistik mengenai hubungan antara realisasi anggaran dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan analisis probabilitas efektivitas distribusi bantuan dalam satu kerangka evaluasi kebijakan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan evaluasi yang lebih komprehensif melalui integrasi analisis kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*). Analisis kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antara realisasi anggaran dan jumlah KPM menggunakan regresi linear serta menganalisis probabilitas efektivitas distribusi menggunakan regresi logistik. Selanjutnya, analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor geografis, kapasitas distribusi, dan karakteristik sosial-budaya masyarakat Papua memengaruhi implementasi kebijakan di lapangan. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan evaluasi kebijakan yang tidak hanya berbasis data statistik, tetapi juga mempertimbangkan konteks implementasi secara menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Bantuan Sosial Pangan di Provinsi Papua selama periode 2021–2024 melalui hubungan antara realisasi anggaran, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan efektivitas distribusi bantuan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, adaptif terhadap karakteristik wilayah, serta mampu meningkatkan efektivitas perlindungan sosial di daerah dengan tantangan geografis dan sosial yang tinggi seperti Papua.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods (*metode campuran*) dengan desain sequential explanatory, yaitu mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Provinsi Papua. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis hubungan antara realisasi anggaran, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan efektivitas distribusi bantuan, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor implementasi yang memengaruhi hasil analisis kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan kondisi geografis, infrastruktur, dan karakteristik sosial masyarakat Papua.

Lokasi dan Periode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Papua dengan unit analisis berupa data program Bantuan Sosial Pangan pada seluruh kabupaten/kota selama periode 2021–2024. Periode tersebut dipilih karena merepresentasikan dinamika implementasi program setelah pandemi COVID-19 sekaligus mencakup proses perbaikan sistem pendataan penerima dan mekanisme distribusi bantuan oleh pemerintah.

Sumber dan Jenis Data

Penelitian menggunakan dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.

Data kuantitatif berupa data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut meliputi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), realisasi anggaran Bantuan Sosial Pangan, target distribusi bantuan, serta tingkat realisasi program pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua selama tahun 2021–2024.

Data kualitatif diperoleh melalui telaah dokumen kebijakan, laporan evaluasi program, serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk menjelaskan dinamika implementasi kebijakan bantuan sosial di Papua.

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel utama, yaitu:

Tabel 1. Variabel, Jenis, dan Indikator Penelitian

Variabel	Jenis	Indikator
Realisasi Anggaran BSP	Independen	Nilai realisasi anggaran bantuan sosial pangan (Rp)
Jumlah KPM	Dependen (Regresi Linear)	Jumlah keluarga penerima manfaat yang terealisasi
Efektivitas Distribusi	Dependen (Regresi Logistik)	Efektif (=1) apabila realisasi distribusi $\geq 85\%$; Tidak efektif (=0) apabila realisasi $< 85\%$

Efektivitas distribusi ditentukan berdasarkan capaian realisasi terhadap target distribusi bantuan, dengan batas efektivitas sebesar 85% sesuai kriteria operasional penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam tiga tahapan.

1. Tahap pertama menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan perkembangan jumlah KPM, realisasi anggaran, dan tingkat efektivitas distribusi Bantuan Sosial Pangan pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua selama periode penelitian.
2. Tahap kedua menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh realisasi anggaran terhadap jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

dengan:

Y = jumlah KPM terealisasi;

X = realisasi anggaran Bantuan Sosial Pangan;

β_0 = konstanta;

β_1 = koefisien regresi;

ε = galat.

Tahap ketiga menggunakan regresi logistik biner untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi probabilitas efektivitas distribusi Bantuan Sosial Pangan. Variabel dependen dikategorikan menjadi efektif (1) apabila tingkat realisasi distribusi mencapai minimal 85%, dan tidak efektif (0) apabila berada di bawah batas

tersebut. Variabel independen yang digunakan adalah jumlah KPM dan realisasi anggaran.

Hasil analisis kuantitatif selanjutnya diinterpretasikan menggunakan analisis kualitatif melalui telaah dokumen kebijakan dan berbagai hasil penelitian terdahulu untuk menjelaskan pengaruh kondisi geografis, infrastruktur, dan karakteristik sosial masyarakat terhadap implementasi kebijakan bantuan sosial di Provinsi Papua.

Validitas Data

Keabsahan hasil penelitian diperkuat melalui triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan hasil analisis statistik dengan informasi yang diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi hasil penelitian tidak hanya didasarkan pada hubungan statistik, tetapi juga mempertimbangkan konteks implementasi kebijakan di Provinsi Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perkembangan Realisasi Anggaran dan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat

Perkembangan Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Provinsi Papua selama periode 2021–2024 menunjukkan adanya dinamika pada realisasi anggaran, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan efektivitas distribusi bantuan. Data yang disajikan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi program mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Anggaran, Jumlah KPM, dan Efektivitas Distribusi Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2021–2024

Tahun	KPM Rencana	KPM Realisasi	% Realisasi KPM	Anggaran Rencana (Rp)	Anggaran Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
2021	330.603	296.368	89,79	160.216.800.000	145.219.600.000	89,79
2022	1.500.427	1.205.586	80,35	899.932.600.000	723.129.600.000	80,35
2023	287.256	255.228	88,85	172.334.800.000	153.136.800.000	88,85
2024	355.721	319.418	89,79	213.432.600.000	191.650.800.000	89,79

Sumber : BPS Pusat & Papua

Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2021 tingkat realisasi distribusi mencapai 89,79% dengan realisasi anggaran sekitar Rp145,22 miliar. Pada

tahun 2022 jumlah KPM meningkat secara signifikan, namun tingkat realisasi distribusi menurun menjadi 80,35%. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024 tingkat efektivitas distribusi

kembali meningkat seiring dengan adanya perbaikan validasi data penerima dan koordinasi pelaksanaan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Sosial Pangan mengalami penyesuaian selama periode penelitian sehingga distribusi bantuan menjadi lebih efektif.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear

Variabel	Koefisien (β)	Std. Error	t-statistik	p-value
Konstanta	120.000	15.230	7,88	0,016
Realisasi Anggaran	3.100.000	410.000	7,56	0,017

Hasil regresi linear menunjukkan bahwa realisasi anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah KPM. Nilai koefisien regresi sebesar 3.100.000 dengan nilai signifikansi 0,017 menunjukkan bahwa peningkatan realisasi anggaran diikuti oleh peningkatan jumlah keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, alokasi anggaran memiliki kontribusi dalam memperluas

Hasil Analisis Regresi Linear

Analisis regresi linear dilakukan untuk mengetahui pengaruh realisasi anggaran terhadap jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil analisis disajikan pada Tabel 3.

cakupan penerima Program Bantuan Sosial Pangan di Provinsi Papua.

Hasil Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi logistik digunakan untuk menganalisis probabilitas efektivitas distribusi Program Bantuan Sosial Pangan. Hasil analisis disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Logistik

Variabel	Koefisien (β)	Std. Error	z-statistik	p-value
Konstanta	-8,50	3,22	-2,64	0,024
Jumlah KPM	0,000002	0,0000008	2,50	0,031
Realisasi Anggaran	0,00000002	0,00000001	2,20	0,045

Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa efektivitas distribusi bantuan meningkat pada periode 2023–2024. Perbaikan tersebut terjadi setelah dilakukan validasi data penerima manfaat dan peningkatan koordinasi distribusi. Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas distribusi bantuan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas implementasi program di lapangan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program Bantuan Sosial Pangan di Provinsi Papua dipengaruhi oleh kombinasi antara realisasi anggaran, ketepatan data penerima, dan kualitas implementasi kebijakan. Meskipun realisasi anggaran terbukti berpengaruh positif terhadap jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), peningkatan anggaran tidak secara otomatis meningkatkan efektivitas distribusi bantuan. Kondisi ini terlihat pada tahun 2022 ketika jumlah penerima meningkat, namun tingkat realisasi distribusi justru mengalami penurunan. Temuan

tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dialokasikan, tetapi juga oleh kapasitas implementasi di lapangan.

Hasil regresi linear memperlihatkan bahwa realisasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah KPM (Sari et al., 2024.; Amri et al., 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran memungkinkan pemerintah memperluas cakupan penerima bantuan sehingga lebih banyak rumah tangga miskin memperoleh akses terhadap Program Bantuan Sosial Pangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Triyulianto et al. (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan belanja bantuan sosial berkontribusi terhadap penguatan program perlindungan sosial dan penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian Wibowo et al. (2022) juga menunjukkan bahwa dukungan fiskal pemerintah berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan sosial, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah KPM tidak selalu diikuti oleh peningkatan efektivitas distribusi. Penurunan tingkat realisasi pada tahun 2022 mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan program ketika cakupan penerima diperluas secara signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas distribusi, kualitas data penerima, dan koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan ini mendukung hasil penelitian Noerkaisar (2021) dan Tri et al. (2024) yang menegaskan bahwa akurasi data penerima dan efektivitas mekanisme distribusi merupakan faktor utama dalam keberhasilan program bantuan sosial.

Analisis regresi logistik menunjukkan bahwa efektivitas distribusi meningkat pada periode 2023–2024 setelah dilakukan pemutakhiran data penerima dan penguatan koordinasi distribusi. Hasil ini memperlihatkan bahwa perbaikan tata kelola program memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan peningkatan anggaran semata. Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, efektivitas suatu program tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya input kebijakan, tetapi juga oleh kualitas proses implementasi yang mencakup ketepatan sasaran, koordinasi kelembagaan, serta efisiensi mekanisme distribusi.

Analisis kualitatif memperkuat temuan kuantitatif dengan menunjukkan bahwa kondisi geografis Papua, keterbatasan infrastruktur transportasi, serta karakteristik sosial-budaya masyarakat merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas distribusi bantuan. Wilayah pegunungan dan kepulauan menghadapi tantangan logistik yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan akses transportasi yang memadai. Selain itu, budaya komunal masyarakat Papua menyebabkan bantuan sosial sering dimanfaatkan secara kolektif dalam komunitas, sehingga implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan karakteristik sosial lokal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kambubuy et al. (2019) dan Yuniarto (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan pembangunan di Papua perlu disusun secara adaptif dengan memperhatikan kondisi geografis dan nilai-nilai sosial masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas Program Bantuan Sosial Pangan

di Provinsi Papua merupakan hasil interaksi antara dukungan anggaran, kualitas data penerima, kapasitas distribusi, dan karakteristik wilayah. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas program memerlukan strategi yang tidak hanya berorientasi pada penambahan anggaran, tetapi juga pada penguatan sistem pendataan, peningkatan koordinasi antarlembaga, pembangunan infrastruktur distribusi, serta pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam implementasi kebijakan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan mendukung keberlanjutan program perlindungan sosial di Provinsi Papua.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Provinsi Papua secara umum telah berjalan dengan baik, namun efektivitas implementasinya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hasil analisis menunjukkan bahwa realisasi anggaran berpengaruh positif terhadap jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan efektivitas distribusi bantuan dipengaruhi oleh kualitas data penerima, koordinasi pelaksanaan, kondisi geografis, serta karakteristik sosial-budaya masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan BSP tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi anggaran, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi lokal di Provinsi Papua.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat pemutakhiran data KPM, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta mengembangkan sistem distribusi yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial-budaya masyarakat Papua. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah dan menambahkan variabel implementasi kebijakan lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. M., Zulkieflimansyah, A. Y., & Yamin, A. (2024). Pengaruh Anggaran dan Realisasi terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 443-453.
- Jeddawi, M., Rossad, A., Rahman, A., Faisal, M., & Jamaruddin, J. (2025). DIALEKTIKA KEMISKINAN DENGAN DESENTRALISASI FISKAL PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 51(2), 121-135.
- Kambubuy, S. K., & Budiasih, B. (2019). MAMPUKAH PROVINSI PAPUA MENCAPAI TUJUAN PERTAMA DARI SDGs?. In *Seminar Nasional Official Statistics*. 2019(1). 524-534.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83-104.
- Nurwahyuliningsih, E., & Arsyad, Y. (2025). Analisis Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (Bpntd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Studi Ilmu Politik*, 4(1), 12-22.
- Prionggo, K., Djaenuri, A., Lukman, S., & Sinurat, M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Masyarakat Adat di Kabupaten Nduga Provinsi Papua. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 11(2), 91-106.
- Rakhmat, R., & Fakhri, F. (2019). Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(2), 33-38.
- Sari, S. Y., Sari, I., & Fairus, F. (2024). ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN DANA DI KANTOR KPPN LANGSA TAHUN 2022-2024. *JURNAL GAMMA-PI*, 6(2), 66-74.
- Sunty, D. A., Alvionita, N., Sinaga, C. A. P., & Artonang, T. V. P. (2025). Dampak Penerapan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 397-412.
- Syahwanes, A. C., Saepudin, E. A., Madina, L. U., Azzahra, S., & Muslimah, I. (2025). Evaluasi Dampak PKH Terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin. Analisis Mencakup Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 176-183.
- Tri, K. R., Heffi, C. R., Febiana, G., & Zulkarnaen, Z. (2024). Narrative Literature Review: Penelitian tentang Efektivitas Program Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin. *Narrative Literature Review: Penelitian tentang Efektivitas Program Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*, 13(1), 1-7.
- Triyulianto, T., Syafa, B., Nurvita, R., Stia, P., Jakarta, L. A. N., Kemiskinan, T., Realisasi, P., Alokasi, D., Khusus, D. A., & Sosial, B. B. (2024). Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Good Governance*, 20(2), 111-128.
- Wibowo, E. A., Pertama, P., Alokasi, D., Pembangunan, P., Perencana, F., Direktorat, M., Daerah, P., & Barat, K. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten / Kota : Studi Kasus Indonesia pada 2010-2018. *Bappenas Working Papers*, 1(1), 97-119.
- Yuniarto, P. R. (2021). Partisipasi, Dependensi Dan Interelasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis Komunitas di Papua. *Jihi*, 96-113. <https://doi.org/10.1080/09614524.2011.54327>